



Administratio:

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Volume 14 (2) 2023: 173-187

P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977

DOI: 10.23960/administratio.v14i2.407

Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)



ARTICLE



Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang

Mutia Febriana^{1*}, Mohammad Ridwan Rangkuti²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Medan

How to Cite: Febriana, M., Rangkuti, M.R. (2023) Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2)

Article History

Received: 19 November 2023

Accepted: 1 Desember 2023

Keywords:

School Dropouts,
Coordination,
Agency Effort,
Unity of Action,
Common Purpose

Kata Kunci:

Anak Putus Sekolah,
Koordinasi,
Usaha Instansi,
Kesatuan Tindakan,
Tujuan Bersama

ABSTRACT

Dropping out of school is a situation where students cannot complete their learning program before the completion of their study period. The large number of dropout cases will affect the low level of education in a country which will then hamper the human development index. Poverty is the main factor that causes many children to drop out of school in underprivileged communities in Pantai Labu Sub-district, especially in coastal areas. The implementation of education is part of the joint responsibility of both the government and the community and the success or failure of an education is very dependent on integrated efforts carried out synergistically between related units. This study aims to determine and analyze how the coordination of local government agencies in Deli Serdang Regency, which in this case leads to the Education Office and the Social Service of Deli Serdang Regency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection used through observation, interviews and documentation. The results showed that there is still weak coordination between related agencies as evidenced by the absence of unity of action in overcoming the problem of school dropouts and tends to have sectoral egos.

ABSTRAK

Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana murid tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai dari masa studinya. Banyaknya kasus anak putus sekolah akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan di suatu negara yang kemudian akan menghambat indeks pembangunan manusia. Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab banyaknya anak putus sekolah pada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Pantai Labu, khususnya pada kawasan pesisir. Penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat dan berhasil tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung dari usaha terpadu yang dilaksanakan secara sinergis antara unit-unit terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini mengarah kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

* Corresponding Author

Email : mutiafebriana12@gmail.com

bahwa masih lemahnya koordinasi antara instansi terkait yang dibuktikan dengan tidak adanya kesatuan tindakan dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah dan cenderung memiliki ego sektoral.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana pencapaian pembangunan perekonomian suatu negara tertentu ditunjukkan oleh tingginya perekonomiannya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai salah satu metode umum yang digunakan sebagai indikatornya. PDB merupakan hasil akhir dari semua produksi yang tercapai dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dengan yang namanya liberalisasi ekonomi dan globalisasi modern yang dapat mempercepat perkembangan sistem ekonomi ke arah yang lebih luas antar negara dan proses koalisi ekonomi di berbagai kawasan dunia (Putri, 2022).

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat terbuka, karena suatu pendidikan tidak dapat berjalan sesuai fungsinya apabila mengesampingkan diri dari lingkungannya. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya sekedar pengajaran, melainkan sebagai suatu proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Fungsi pendidikan merujuk pada sumbangan dibidang pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda (Nurkholis, 2013:25). Menurut Septiana (2008) dengan adanya pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia yang memiliki ilmu dapat berkembang menjadi apa yang ia inginkan dan menjadi seperti apa yang ia cita-citakan.

Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting bagi kemajuan negara, karena maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari bidang pendidikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri, masih terdapat banyak tantangan dan hambatannya termasuk masalah putus sekolah. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) ada sekitar 76.834 anak yang putus sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023 (Databoks.katadata.co.id, 2023).

Tabel 1. Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2022

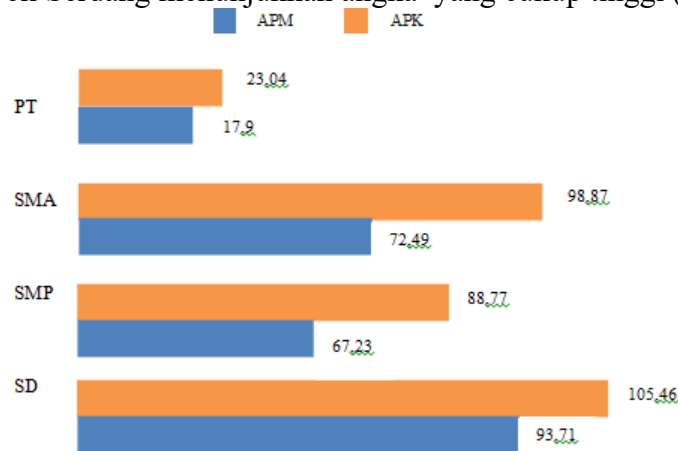
Tahun	SD	SMP	SMA	SMK
2018/2019	33.268	28.651	15.953	25.357
2019/2020	59.443	38.464	26.864	32.395
2020/2021	44.516	11.378	13.879	13.951
2021/2122	38.176	15.042	10.055	12.063
2022/2023	40.623	13.716	10.091	12.404

Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (dalam Databoks)

Selama lima tahun terakhir Sekolah Dasar (SD) menjadi jenjang pendidikan tertinggi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali provinsi-provinsi besar sekalipun. Sumatera Utara ada di urutan ketiga sebagai provinsi penyumbang anak putus sekolah terbanyak dengan jumlah 9.266 ribu anak,

sedangkan untuk Kabupaten/Kota ditempati oleh Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 266 anak usia Sekolah dasar dan 312 anak Usia Menengah Pertama.

Padahal jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka yang cukup tinggi (Analisedaily, 2022).



Gambar 1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Deli Serdang

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah sesuai pada kelompok usia tersebut. Dapat dikatakan bahwa APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang bersekolah sesuai jenjang pendidikannya tanpa memperhatikan ketepatan usia. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah namun belum mencukupi usia atau melebihi usia yang seharusnya.

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai APK di Kabupaten Deli Serdang selalu lebih tinggi daripada nilai APM, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia yang tidak sesuai dengan seharusnya. Dengan jumlah APM dan APK yang cukup tinggi seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kabupaten Deli Serdang, tetapi kenyataannya tidak demikian. Hal ini terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang berada di kawasan pesisir. Pada tahun 2022 terdapat 22 anak yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan 30 anak yang tidak melanjutkan SMP dan SMA. Dampak dari anak putus sekolah memiliki banyak aspek karena secara bersamaan menyebabkan kerugian bagi mereka dan juga struktur masyarakat. Ingram (2011) berpendapat bahwa individu yang kurang berpendidikan memiliki peluang yang lebih kecil untuk berkinerja baik dalam sistem ekonomi saat ini. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sholekhah, 2018:48) bahwa anak putus sekolah cepat atau lambat akan menyebabkan masalah yang fatal seperti banyak anak yang menjadi pengangguran karena minimnya kemampuan dan pengetahuan, serta akan membuat anak tersebut dipandang rendah oleh orang lain. Selain itu, banyaknya anak putus sekolah juga berdampak terhadap masyarakat sekitar, karena anak putus sekolah cenderung melakukan tindakan kriminalitas dan kenakalan remaja lainnya yang membuat masyarakat resah dan tidak nyaman.

Lebih luas, hal ini juga akan berdampak terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Semakin tingginya jumlah anak putus sekolah semakin berkurang pula kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global terutama akan mempengaruhi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut tentunya akan memperburuk kondisi kemiskinan dan

ketidaksetaraan sosial karena orang-orang yang putus sekolah cenderung sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah anak putus sekolah karena keterbatasan sumber dan kemampuan, mayoritas keluarga Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan yang minim dan dalam situasi seperti ini prioritas keluarga tidak lagi berfokus terhadap pendidikan melainkan berpusat pada kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.

Ketimpangan ekonomi yang meluas di masyarakat juga berperan dalam meningkatkan angka anak putus sekolah, keluarga dari latar belakang ekonomi rendah cenderung lebih rentan kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup. Apalagi setelah adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pesisir yang hanya bergantung pada hasil-hasil laut saja. Kesenjangan ekonomi ini mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil dan tertinggal (Syahza, Backe, & Hamlin, 2015). Hal ini terjadi pula pada kondisi ekonomi masyarakat nelayan di kawasan pesisir Pantai Labu yang terbilang cukup memprihatinkan dikarenakan jumlah pendapatannya yang masih rendah. Jumlah pendapatan yang tidak pasti juga menjadi salah satu alasan mengapa kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan pesisir. Situasi dan kondisi yang seperti ini disebabkan karena nelayan di kawasan pesisir Pantai Labu merupakan kelompok yang sulit untuk diorganisasikan dan kelompok nelayan tidak memiliki alur kas yang jelas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti serta belum banyak program yang benar-benar dapat mengembangkan perekonomian mereka secara nyata, terorganisasi dan berkelanjutan. Pembangunan di kawasan pesisir juga tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, bahkan rendahnya taraf kehidupan masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan asset dan sumber-sumber pembiayaan bagi kehidupan nelayan merupakan persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir (Amanah, 2010). Semakin rendah penghasilan tiap keluarga maka semakin berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan setiap harinya, termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Mayoritas keluarga menyatakan penyebab utama anak mereka putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah sebesar 67,0% dan 8,7% anak harus mencari nafkah (Ali: 2019).

Mengingat faktor terbesar alasan anak putus sekolah adalah karena kemiskinan, maka diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi penyelenggara kesejahteraan sosial. Hal ini tentunya akan berdampak pada optimalisasi pelayanan di bidang pendidikan. Namun, fakta dilapangan menunjukkan masih terdapatnya masalah koordinasi antara instansi tersebut. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa tidak ada intervensi langsung antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jelas pernyataan tersebut menunjukkan minimnya komunikasi dan terkesan memiliki ego sektoral di kedua instansi tersebut. Selanjutnya fakta yang peneliti temukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu adalah bahwa anak-anak putus sekolah tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga anak-anak yang putus sekolah atau rentan sekolah tetap tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi seperti Perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan dan lainnya (Herlambang & Murwani, 2012). Manajemen pada umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan

dengan tujuan mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (F.Sikukula dalam Hasibuan, 2009:6). Para ahli memiliki pengertian sendiri mengenai manajemen, yaitu menurut Terry dan Laslie (dalam Manullang, 1985:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Safroni, 2012:44) manajemen ialah proses perencanaan, kepemimpinan, pengendalian upaya anggota organisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen mengacu pada suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan (Sondang P. Siagian, dalam Sjamsuddin, 2016:21). Sejalan dengan pendapat George R. Terry (dalam Nawawi, 1998:39) bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan dengan upaya sumber daya manusia atau anggota-anggota dalam organisasi. Terdapat tiga tujuan manajemen menurut Hasibuan (2015) jika dilihat dari perspektif manajemen publik, yakni 1) *Service objectives*, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan konsumen. 2) *Social objectives*, bertujuan agar meningkatkan nilai guna yang diciptakan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat. 3) *Personal objectives*, bertujuan agar para karyawan secara individual ekonomi dan sosial psikologi mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaannya dalam organisasi.

Manajemen juga memiliki unsur seperti yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Pengantar Manajemen karya M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika (2018), menyatakan bahwa ada enam unsur pokok yang membentuk manajemen seperti unsur *man, money, material, machine, method*, dan *market*. Semua unsur pokok ini memiliki fungsinya masing-masing dan saling berinteraksi guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. *Man* adalah sumber daya manusia yang melakukan segala kegiatan manajemen dan produksi. *Money* adalah unsur pendanaan dan pembiayaan, tanpa ada keuangan yang memadai kegiatan organisasi tak akan berjalan sebagaimana mestinya karena hal ini berkaitan dengan masalah anggaran, upah karyawan, dan pendapatan organisasi. *Material* berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi yang nantinya memiliki nilai harga tinggi sehingga mendatangkan keuntungan. *Machine* adalah alat atau mesin pengolah yang dipakai dalam pengolahan barang dengan harapan menjadikan kegiatan produksi akan lebih efisien dan menguntungkan. *Method* adalah tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan mempertimbangkan sasaran agar mencapai tujuan yang hendak di capai. *Market* adalah unsur yang terakhir, merupakan tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan.

Manajemen Publik

Secara umum manajemen publik merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Manajemen publik menjadi unsur yang sangat penting bagi penyelenggara organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik. Nor Ghofur (2014) mengartikan manajemen publik sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen publik juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab menjalankan tugasnya dalam pemanfaatan sumber daya (Shafritz dan Russel dalam Keban, 2008:93).

Menurut Overman (dalam Keban, 2004:85) manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukan juga administrasi publik atau unsur yang mereflesikan tekanan-tekanan antara orientasi politik dengan kebijakan lainnya melainkan studi interdisipliner yang merupakan gabungan antara fungsi manajemen. Donovan dan Jackson (2011:11-12)

berpendapat bahwa manajemen publik merupakan aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan atau kemampuan. Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi manajemen publik seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik yang berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya dalam kurun waktu yang lama (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

Koordinasi

Koordinasi adalah proses penyatuan sasaran-sasaran dari unit-unit yang terpisah, baik itu bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien (Stoner dalam Sugandha, 2011:212). Selaras dengan pernyataan diatas, Awaluddin Djamin (dalam Kementrian Koordinator BPMP, 2015:15) mengatakan bahwa koordinasi adalah proses kerjasama yang terjadi antara badan, instansi, dan unit dalam melaksanakan tugas sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan Hasibuan (dalam Arif, 2015:8), koordinasi adalah proses menggerakkan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok agar kegiatan yang dilaksanakan dapat seimbang di antara para anggota itu sendiri.

Menurut Bakhtiar (2019) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, koordinasi terkadang juga disebut kerjasama tetapi sebenarnya lebih dari sekedar kerjasama karena koordinasi juga mengandung makna sinkronisasi. Koordinasi terjadi apabila ada dua individu atau organisasi yang bekerjasama dan saling mempengaruhi kedua belah pihak. Kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi sudah pasti ada upaya kerjasama. Untuk mencapai tujuan kolektif, perlu dilakukan koordinasi yang baik sehingga kerjasama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama (Ariyanto, 2018).

Menurut Ramadani (2017:151) koordinasi adalah proses dimana seorang pemimpin mengembangkan usaha kelompok antara bawahannya secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Moekijat (dalam Kamaria 2014:9) koordinasi adalah penyelarasan atau penyusunan kembali kegiatan yang telah ada kemudian berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan secara teratur. Lebih lanjut Pearce II dan Robinson mengatakan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2012).

Aktivitas koordinasi dapat diartikan sebagai “mengelola ketergantungan antar kegiatan” yang terjadi Ketika tindakan yang dilakukan suatu system dapat mempengaruhi tindakan system lainnya. Ketergantungan biasanya dianggap sebagai suatu masalah bagi Sebagian aktor karena dengan meningkatnya ketergantungan, mekanisme koordinasi yang kuat juga semakin diperlukan maka dari itu Sebagian aktor tadi melakukan tindakan untuk mengurangi potensi ketergantungan. *Coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk menghindari adanya kekacauan, percekocokan dan perkelahian dengan cara menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan pegawai sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan, upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberi instruksi, perintah, bimbingan dan pelatihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan aktivitas yang mengatur beragam elemen kedalam suatu pengoperasian yang terpadu dan sinkron untuk menciptakan kerjasama yang selaras sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002:3) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

menggambarkan permasalahan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui proses pengamatan, kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau narasi dari perilaku orang-orang atau objek yang diamati. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023 hingga Juni 2023. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan, diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pelaksanaan observasi wawancara dilaksanakan secara langsung di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, serta di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu. Hal tersebut dilakukan karena perlu adanya perolehan data dan hasil yang valid melalui ketiga lokasi tersebut mengenai koordinasi dalam penanganan anak putus sekolah, sehingga dapat memperoleh validitas data melalui hasil wawancara maupun observasi dari informan tersebut.

Untuk memperoleh data, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang dilakukan dengan penentuan kriteria terhadap informan yang dianggap memiliki kemampuan mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian informan yang sedikit lama-lama berkembang menjadi lebih banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang spesifik serta lebih banyak. Informan dalam penelitian ini ada 9 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Staff Ahli Muda Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Rantau Panjang, serta lima orang lainnya adalah anak putus sekolah di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu. Kemudian untuk Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori manajemen publik. Manajemen ialah proses perencanaan, kepemimpinan, pengendalian upaya anggota organisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Stoner dan Freeman dalam Safroni, 2012: 44). Selanjutnya menurut Noor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Henry Fayol (dalam Safroni, 2012: 179) menyatakan terdapat beberapa prinsip manajemen yang di dalamnya terdapat lima fungsi manajemen yaitu: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), dan Pengendalian (*controlling*). Pengkoordinasian yang dimaksudkan adalah adanya penekanan koordinasi dalam manajemen publik. Ramadani (2017:151) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses dimana seorang pemimpin mengembangkan usaha kelompok antara bawahannya secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Money (dalam Syafie, 2011: 34) terdapat beberapa indikator untuk dapat melihat koordinasi yaitu *agency effort* (usaha instansi), *unity of action* (kesatuan tindakan), dan *common purpose* (tujuan bersama).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan dasar 9 tahun nampaknya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang tidak dapat merasakannya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian wajib belajar 9 tahun, salah satunya adalah siswa yang putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Putus sekolah dapat dikategorikan kedalam tiga tahapan yaitu, yang pertama adalah disaat anak tersebut sudah mendaftar kesekolah namun tidak melanjutkan proses sampai ia dinyatakan diterima oleh sekolah yang bersangkutan yang disebabkan oleh beberapa alasan. Yang kedua adalah pada saat proses belajar atau ditengah-tengah masa studi siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan yang terakhir ialah pada saat akhir penyelesaian masa studi atau ketika akan tamat. Pada kegiatan observasi

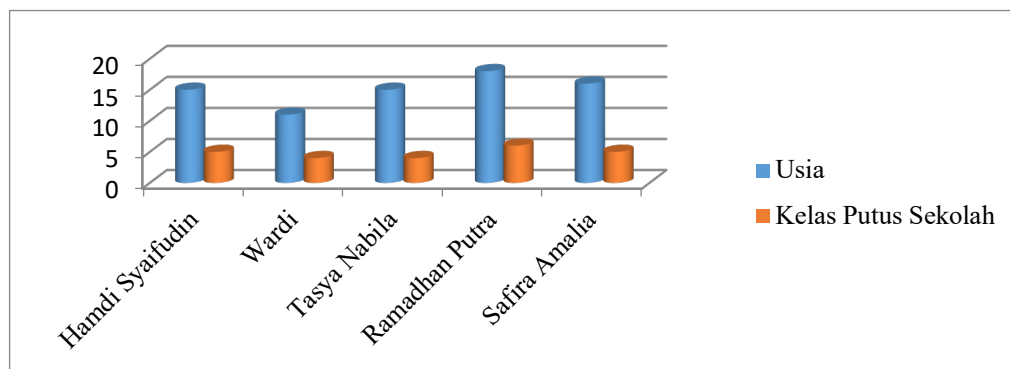
peneliti menemukan bahwa di desa Rantau Panjang sendiri kebanyakan anak putus sekolah masih berada pada jenjang Sekolah Dasar.

Tabel 2. Data Anak Putus Sekolah Padan Jenjang Sekolah Dasar di Desa Rantau Panjang

Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Kelas Putus Sekolah
Hamdi Syaifudin	15 Tahun	Laki-Laki	5 SD
Wardi	11 Tahun	Laki-Laki	4 SD
Tasya Nabila	15 Tahun	Perempuan	4 SD
Ramadhan Putra	18 Tahun	Laki-Laki	6 SD
Safira Amalia	16 Tahun	Perempuan	5 SD

Sumber : Arsip Desa Rantau Panjang, 2022

Berdasarkan arsip Desa Rantau Panjang tercatat ada 22 anak yang tidak tamat sekolah dasar dan penulis berkesempatan mewawancarai 5 orang anak dari jumlah tersebut. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa kelima anak tersebut rata-rata berhenti sekolah pada kelas 4 dan 5 yang artinya masih pada tahap proses masa studi.



Gambar 2. Grafik Distribusi Anak Putus Sekolah Desa Rantau Panjang

Dari grafik diatas diketahui bahwa usia putus sekolah masih berada pada usia produktif yakni dibawah 17 tahun, dan untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan padahal menurut Umbu Reku Raya (2021:9) resiko anak perempuan untuk putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki dikarenakan sebesar 12,27 persen pemicu putus sekolah disebabkan pernikahan dini, sementara anak laki-laki umumnya putus sekolah karena membantu ekonomi keluarga. Pernikahan dini yang dialami anak-anak perempuan sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran hak anak, pernikahan dini lebih berpeluang terjadi di kalangan anak-anak perempuan dengan kondisi ekonomi rendah. Keluarga yang memiliki banyak anak sementara penghasilan sehari-hari yang dimiliki tidak mencukupi menjadi pertimbangan mereka untuk segera menikahkan anak perempuan yang dianggap bukan sebagai tenaga kerja produktif. Berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap sebagai sumber penghasilan dan tidak membebani keluarga.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di Desa Rantau Panjang ditemukan bahwa tidak ada perlengkapan sekolah dirumah, seperti buku dan peralatan tulis selain itu tidak ada juga kegiatan belajar yang dilakukan dirumah seperti membaca dan menulis. Alasan berhenti sekolah juga hampir sama yakni mata pelajaran yang semakin susah dan faktor ekonomi yang menyebabkan mereka memilih untuk berhenti sekolah. Orang tua

mereka bekerja sebagai nelayan yang terkadang hanya cukup untuk membiayai makan sehari-hari.



Gambar 3. Anak Putus Sekolah di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu

Wardi adalah salah satu anak putus sekolah di Desa Rantau Panjang, berusia 11 tahun yang berhenti sekolah pada kelas 4 sd yang disebabkan karena ia adalah murid pindahan dari Pantai Cermin kemudian lama-kelamaan sudah tidak ada niatnya untuk bersekolah ditambah lagi keadaan ekonomi keluarganya yang kurang mampu, maka dari itu Wardi memutuskan untuk berhenti sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh Wardi pada tanggal 7 Agustus 2023, beliau mengatakan bahwa :

“Kelas 4 kak saya putus sekolah karena dulu saya dari Pante Cermin, terus pindah kesini, saya ngerasa pelajarannya makin sulit lama-lama saya sudah malas sekolah terus gada uang juga untuk perlengkapan sekolah dan untuk jajan, terus orangtua juga ga pernah dapat bantuan sosial apapun”.

Wardi tinggal bersama keluarganya yang sesekali ikut kelaut bersama ayahnya. Menurut informasi yang didapat dari kepala dusun keluarga Wardi tidak mendapatkan bantuan sosial apapun termasuk PKH dikarenakan alamat domisilinya belum berubah dan data penerima manfaat PKH masih yang lama. Dari kelima anak putus sekolah diatas tidak ada satupun yang terdaftar sebagai penerima manfaat PIP dikarenakan tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal Program Indonesia Pintar (PIP) harusnya menjadi jembatan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin terutama bagi anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Rantau Panjang mengenai anak putus sekolah penulis dapat menyimpulkan bahwa ini lebih kepada persoalan koordinasi. Menurut James D. Mooney (dalam Syafie, 2011: 34) terdapat beberapa indikator untuk dapat melihat koordinasi yaitu *agency effort* (usaha instansi), *unity of action* (kesatuan tindakan), dan *common purpose* (tujuan bersama).

Usaha Instansi

Didalam hubungan kerjasama terdapat komunikasi yang digunakan juga sebagai pendukung tercapainya koordinasi, karena koordinasi merupakan hasil akhir dari adanya komunikasi. Koordinasi dan kerjasama adalah dua hal yang memiliki keterkaitan, koordinasi dapat tercapai apabila adanya hubungan kerjasama secara kolektif dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan Bapak Madiman selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Juni 2023.

“Kalau koordinasinya tetap ya karena bagaimanapun itu masih menjadi wewenang kami dan itupun diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang koordinasi di pemerintahan daerah, jadi bentuk koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan hanya sekedar berupa data”.

Namun Dinas Sosial mengatakan pernyataan yang berbeda pada saat peneliti mewawancarai Ibu Ernawati selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tanggal 13 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:

“Dinas sosial menangani dari segi kemiskinannya kita hanya membantu pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan prosesnya di Kementerian Sosial melalui PUSDATIN (Pusat Data)”.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ernawati dapat diketahui bahwa memang masih lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam menangani anak putus sekolah, karena Dinas Sosial hanya membantu masyarakat miskin dengan kriteria-kriteria tertentu seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, sedangkan anak putus sekolah tidak termasuk kriteria yang telah ditentukan. Dinas Sosial hanya bertugas untuk pengusulan DTKS dengan syarat masyarakat yang ingin mendaftar harus memiliki identitas yang padan dengan data pencatatan sipil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Desa/Kelurahan. Pada tahun 2023 ada sekitar 57.822 ribu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dan untuk Kecamatan Pantai Labu sendiri berjumlah 3.065 ribu orang. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Pantai Labu.

Usaha lainnya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian pelatihan dan keterampilan menjahit, otomotif dan kecantikan. Namun sangat disayangkan program ini tidak berjalan lama dikarenakan minimnya kemauan dari anak-anak putus sekolah. Dari indikator usaha instansi ini dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh instansi sudah cukup baik jika dilihat dari perencanaan program, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan masalah karena tidak memiliki keselarasan contohnya dalam pendataan data terpadu kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Firoh Uriyalita, Jamali Syahrodi, dan Sumanta (2020) yang mengatakan bahwa program indonesia pintar dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya anak putus sekolah yang tidak terdaftar.

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang bahwa seorang pemimpin harus mengarahkan usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu didalam organisasi untuk memperoleh keserasian dalam mencapai hasil yang dimaksudkan.

Melalui wawancara penulis dengan Bapak Madiman selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Juni 2023 dikatakan bahwa:

“Karena tidak ada intervensi langsung antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial maka tidak ada tindakan-tindakan yang saling berkaitan di kedua dinas ini. Kalau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus sekolah adalah dengan adanya Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)”.

Di Kabupaten Deli Serdang terdapat 107 PKBM dan 5 diantaranya berada di Kecamatan Pantai Labu seperti PKBM Sanggar Lingkaran, PKBM Cendana, PKBM Bunayya, PKBM Pelita dan PKBM Bina Utama. Namun menurut pengakuan Bapak Reza Fahlevi selaku KAUR di Desa Rantau Panjang hanya ada 2 PKBM yang aktif saat ini di Kecamatan Pantai Labu yakni PKBM

Sanggar Lingkaran dan PKBM Cendana. Adapun satuan biaya pada pendidikan kesetaraan menurut Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3. Satuan Biaya Program Kesetaraan

Jenjang Kesetaraan	Satuan Biaya
Paket A (Sekolah Dasar)	Rp. 1.300.000,-
Paket B (Sekolah Menengah Pertama)	Rp. 1.500.000,-
Paket C (Sekolah Menengah Atas)	Rp. 1.800.000,-

Sumber: Kemendikbud.go.id, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya untuk paket kesetaraan terbilang cukup mahal. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dalam penanganan keluarga miskin yang menjadi alasan utama anak tidak melanjutkan sekolahnya. Dinas sosial memiliki peran penting dalam hal ini sebagai instansi penyelenggara kesejahteraan sosial, namun pada kenyataannya dinas sosial juga menjalankan programnya sendiri seperti yang disampaikan oleh Ibu Ernawati selaku Staff Ahli Muda pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang pada tanggal 21 Juni 2023:

“Saat ini kami hanya fokus terhadap program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditujukan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga yang diorientasikan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan”.

Usaha ekonomi produktif ditujukan kepada kelompok-kelompok usaha bersama guna meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah dituliskan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar 20 persen dari belanja negara dalam APBN, sedangkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial sebesar 15,74 persen. Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Rincian APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Satuan Pendidikan/Jenjang	2021	2022
PAUD	Rp. 30.504.156.093	Rp. 28.618.247.321
SD	Rp. 185.425.071.680	Rp. 271.808.471.915
SMP	Rp. 75.329.322.527	Rp. 78.685.017.206
Paket Kesetaraan Non Formal	Rp. 17.776.490.679	Rp. 21.961.796.517
Jumlah	Rp. 309.035.040.997	Rp. 401.073.532.959

Sumber: APBD Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat anggaran yang besar untuk bidang pendidikan khususnya untuk paket kesetaraan non formal yakni sebesar Rp. 17.776.490.679 di tahun 2021 dan Rp. 21.961.796.517 di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara

dengan Bapak Madiman selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal pada tanggal 13 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:

“Kalau dari segi pendidikannya, anggaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk permasalahan anak putus sekolah dialokasikan untuk penyelenggaraan PKBM itu sendiri. Jadi murni alokasi anggaran dari Bidang ini untuk pelaksanaan dan keperluan PKBM yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tetapi yang bisa saya pastikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak kurang”.

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Reza Fahlevi selaku Kepala Urusan di Kantor Desa Rantau Panjang sekaligus eks fasilitator di PKBM Sanggar Lingkaran Pantai Labu pada tanggal 21 Juni 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk PKBM Sanggar Lingkaran anggarannya dari kafe baca dan agrowisata palonaga milik founder PKBM Lingkaran, namun dalam dua tahun terakhir ini sudah ada perhatian dari Dinas Pendidikan memberikan isentif kepada fasilitator setiap bulan karena dulu fasilitator hanya sukarelawan”.

Jika dilihat dari indikator kesatuan tindakan ini, melalui wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tidak adatinindakan-tindakan yang selaras atau tindakan yang saling berkaitan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, bahkan Dinas Pendidikan terkesan menutup-nutupi anggaran untuk PKBM. Kedua instansi ini menjalankan programnya masing-masing hal ini membuktikan adanya ego sektoral antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Padahal Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi adanya penyimpangan implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak transparan atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka besar kemungkinan akan terjadi penolakan dari kelompok sasaran (Rangkuti, M.R., & Rangkuti, Z.A, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggun Trytami, Intan Fitri Meutia, dan Vina Karmilasari (2022) yang mengatakan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan Kota Palembang menjalankan sebuah program yang dinamakan Sekolah FILIAL dan APS yang ditujukan untuk anak jalanan yang melibatkan perencanaan sekolah, kolaborasi guru restrukturisasi semua sumber yang berkaitan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat miss komunikasi dan ego sektoral dari pihak sekolah dengan sumber-sumber pendukung lainnya.

Tujuan Bersama

Koordinasi hanya terjadi apabila adanya kesadaran dan kesediaan secara sukarela dari semua anggota organisasi termasuk seorang pemimpin. Dalam hal ini koordinasi menuntut adanya sikap dan prilaku tertentu dari orang-orang yang memiliki hubungan. Tujuan bersama merupakan unsur koordinasi yang melengkapi dari unsur-unsur lainnya dikarenakan dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama. Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada instansi yang terlibat antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan anak putus sekolah. Dalam tujuan bersama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Ibu Tiodora selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada tanggal 21 Juni 2023 mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara mengenai tujuan bersama yah sudah pasti ada, walaupun Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan tidak memiliki hubungan langsung dalam kasus anak putus sekolah tetapi kedua dinas ini memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkup Kabupaten Deli Serdang. Apalagi kami sama-sama bekerja untuk melayani dan membantu masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Madiman selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal yang mengatakan bahwa:

“Tujuan yang diharapkan dengan adanya koordinasi ini yah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Secara garis besar Dinas Pendidikan menangani anak putus sekolah melalui PKBM kemudian Dinas Sosial menangani keluarga fakir miskin”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tiodora dan Bapak Madiman dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sama-sama memiliki tujuan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sejauh ini proses penanganan anak putus sekolah yang dilakukan antar instansi sudah dilakukan dengan cukup baik ditandai dengan dilakukannya usaha-usaha dalam pencapaian yang efektif dengan program-program yang ada.

Pada dasarnya, studi ini memfokuskan pada koordinasi yang dilakukan dalam rangka penanganan anak putus sekolah yang tidak dapat dijalankan oleh satu pihak melainkan membutuhkan dukungan dan Kerjasama dari berbagai pihak termasuk lingkungannya. Seperti yang dijelaskan oleh Jelence (2009) dalam tulisan yang berjudul *Review of Theoris in Strategic Management Field-toward the Creation of School of Strategic Management* sekelompok ahli teori menyatakan bahwa organisasi akan mati apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lebih lanjut, didalam tulisan tersebut terdapat penulis yang Bernama Lawrence dan Lorsch di tahun 1967 dalam publikasinya yang berjudul *Differentiation and Integration Complex Organization* yang mengembangkan teori system terbuka tentang bagaimana organisasi dan sub-unit dapat beradaptasi untuk memenuhi tuntutan lingkungan terdekat mereka. Organisasi yang mampu menyeimbangkan antara diferensiasi namun tetap mempertahankan integrasi merupakan organisasi yang siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Lawrence dan Lorsch, 1967:7).

Perubahan lingkungan yang dimaksudkan ialah adanya keharusan organisasi dalam menyatukan, memisahkan atau bahkan mengkoordinasikan sehingga jika organisasi telah menerapkan *Differentiation and Integration in Complex Organization* maka jelas akan memberikan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang akan datang. Apabila merujuk kepada koordinasi instansi pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan anak putus sekolah, dapat dilihat bahwa adanya diferensiasi atau perbedaan dari masing-masing instansi, tetapi terdapat beberapa tupoksi yang mengharuskan kedua instansi tersebut melakukan penyatuan pada unit-unit yang saling berkaitan. Namun pada kenyataanya semakin terdiferensiasi subsistem-subsistem itu, maka semakin sulit untuk mencapai integrasi yang efektif dan kerjasama di antara mereka.

E. PENUTUP

Dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap permasalahan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki terutama kesadaran dari masing-masing instansi.

Anak putus sekolah di Desa Rantau Panjang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dan berhenti sekolah sejak kelas 4 dan 5 Sd yang masih pada usia wajib belajar dengan rentang usia 11-18 tahun dan sudah tidak ditemukan lagi perlengkapan-perengkapan sekolah bahkan aktivitas belajar dirumah. Kemudian jika dilihat dari indikator : 1) Usaha instansi, telah melakukan usaha dan Upaya dengan menciptakan program-program seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan program usaha ekonomi produktif (UEP), namun sejauh ini usaha dari kedua dinas tersebut belum sejalan dalam mengatasi anak putus sekolah. 2) Kesatuan tindakan, sejauh ini proses koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang masih dinilai kurang baik dikarenakan terdapat ego sektoral yang dibuktikan dengan tidak adanya keselarasan antar program yang telah direncanakan. Selain itu mereka hanya menjalankan programnya masing-masing. 3) Tujuan bersama, koordinasi yang dilakukan antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang telah mengedepankan tujuan bersama, yakni sama-sama bertujuan

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup Kabupaten Deli Serdang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengapresiasi dengan adanya dukungan dari beberapa pihak yang membantu pada penelitian ini hingga lancar, ucapan terimakasih terutama bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, serta Pemerintahan Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu, serta Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dari awal hingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abdul, Ghofur Noor Ruslan. (2013). Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Di Indonesia. Yogyakarta.
- Ali, Mohammad. (2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Grasindo.
- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 8(1), 11-19. <https://doi.org/10.46937/820105691>
- Amirul, Khair. (2020). Arist Merdeka Sirait Kunjungi Pesisir Pantai Labu, dalam <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/12/08/1012943/arist-kunjungi-pesisir-pantai-labu/>. (diakses pada 03 Maret2023).
- Anang, Firmansyah. (2018). Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta.
- Annur, Cindy Mutia. (2022). Berapa Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia?, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia>. (diakses pada 10 Maret2023).
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Journal of Management Review, 2 (1), 161-171. <http://dx.doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Awaloedin, Djamin. (2015). Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000. Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- Bakhtiar, H. M. (2019). Pengaruh motivasi, Koordinasi, Komunikasi, Kepuasan Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Magenta, 7 (1), 31-34.
- Hasibuan, Malayu. (2009). Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, S dan Murwani, A. (2012). Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kurian, Aju. Et all. (2023). School Dropouts: Reasons and Prospective Solutions-Teachers' Perspective. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 11 (3), 2-3.
- Lexy, J Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. Jurnal Kependidikan, 1 (1), 24-44. <https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>.
- Ramadani, I. R. (2017). Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oleh PT Swakarsa Sinas Sentosa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Pemerintahan Integratif, 5 (1).

- Rangkuti, M.R., & Rangkuti, Z.A. (2023). The Policy of Village Infrastructure Service In Deli Serdang Regency, Indonesia. Multidisciplinary Reviews, (I Accepted Articles). Retrieved from <https://malque.pub/ojs/index.php/mr/article/view/868>.
- Sabrina., & Siti, Hazzah Nur. (2022). Koordinasi Tim Pora Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik Di Kota Medan. Jurnal Professional. 9 (2). <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3241>.
- Safroni, (2012). Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian sosial. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia. Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahza, A., Bakce, D., & Hamlin, N. (2015). Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian, 2(1), 1-12.
- Trytami, Anggun. (2022). Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang. Jurnal Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4 (2). <https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i2.182>
- Uriyalita, Fitroh., Jamali Syahrodi., Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. Edun Journal, 3 (2). <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69>

